

**KEMAMPUAN KERJA PULDATAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP - PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL-PM) 2020  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**Resdian Prima Noviawan, H. M. Zainul, Khuzaini**

Program pascasarjana Prodi Magister Manajemen

Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari

[respriawan@gmail.com](mailto:respriawan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Kemampuan Kerja Puldatan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu guna memenuhi harapan masyarakat. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan kerja anggota puldatan dalam Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tujuan dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut belum tercapai. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL masih jauh dari target yang ditetapkan di Kantor Pertanahan Tanah Laut. Prosedur pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena menggunakan juknis dan juklak sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program PTSL. Sasaran dalam program ini sudah tepat sasaran hanya saja kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas pelaksana PTSL membuat program ini sedikit terhambat adapun hambatan lainnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset tanah miliknya. Kompetensi SDM sudah sesuai dengan keahliannya dibidang masing masing hanya saja kurangnya jumlah pegawai atau petugas pelaksana PTSL memengaruhi kinerja anggota puldatan sehingga kurang maksimal.

**Kata kunci :** Kemampuan Kerja Puldatan dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

---

**ABSTRACT**

*The purpoe o this study was to determine and analyze the effect of HR Planning, HR Development, and Puldatan work ability in the complete system land registration program community participation (PTSL-PM) 2020 Tanah Laut Land Office.*

*Performance is a record of the results obtained from certain job functions or certain activities over a certain period of time in order to meet community expectations. PTSL is a land registration process for the first time, which is carried out simultaneously and includes all land registration objects that have not been registered in a village or sub-district area or other names of the same level. Through this program, the government provides guarantees of legal certainty or rights to land owned by the community. This study aims to determine the working ability of puldatan members in the Implementation of the PTSL Program (The complete systematic Land Registration program) at the Land Office of Tanah Laut Regency. The method used in this research is descriptive method with qualitative analysis. While the data collection techniques in this study were interviews and literature study.*

*Based on the results of the study, it can be seen that the objectives in implementing the PTSL program at the Land Office of Tanah Laut Regency have not been achieved. This can be seen from the number of people participating in the PTSL program which is still far from the target set at the Tanah Laut Land Office. The implementation procedure is in accordance with the procedures and regulations set by the government because it uses technical and operational guidelines as a basic reference in implementing the PTSL program. The target in this program has been right on target, it's just that the lack of socialization provided by PTSL implementing officers makes this program a little hampered while another obstacle is the lack of public awareness in protecting their land assets. HR competencies are in accordance with their expertise in their respective fields, it's just that the lack of employees or PTSL implementing officers affects the performance of Puldatan members so that they are not optimal.*

**Keywords :** Puldatan and PTSL Workability (Complete Systematic Land Registration Program)

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bagi Bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, ***kebijakan pertanian diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat"***.

Amanat konstitusi di bidang pertanian menuntut agar politik dan kebijakan pertanian dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (sebagaimana diamanatkan pada Sila kelima Pancasila dalam pembukaan UUD 1945) dan mewujudkan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran, terutama tanah. Tanah adalah sesuatu yang sangat vital bagi

sebagian besar rakyat Indonesia yang susunan masyarakat dan perekonomiannya bercorak agraris. Tanah adalah kehidupan. Dengan terbukanya akses rakyat kepada tanah dan dengan kuatnya hak rakyat atas tanah, maka kesempatan rakyat untuk memperbaiki sendiri kesejahteraan sosial-ekonominya akan semakin besar. Martabat sosialnya akan meningkat. Hak-hak dasarnya akan terpenuhi. Rasa keadilan rakyat sebagai warga negara akan tercukupi. Harmoni sosial akan tercipta. Kesemuanya ini akan menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Selain Pancasila dan UUD 1945, nilai-nilai dasar di bidang pertanian juga dinyatakan oleh TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan seterusnya dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta

dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Hubungan manusia dengan tanah dalam perkembangannya sering terjadi adanya benturan/pergesekan kepentingan, baik benturan kepentingan antar sesama badan pribadi/privat maupun antara privat dengan badan hukum dan sebaliknya. Hal inilah yang menjadi beban tugas dari instansi BPN untuk menyelesaikannya dengan berupaya melaksanakan penataan pertanahan guna terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yaitu Tertib Hukum, Administrasi, Penggunaan dan pemanfaatan tanahnya serta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan sekitarnya.

Kualitas pelayanan adalah salah satu isu yang sangat krusial dimana hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari tahun ketahun semakin besar. Sementara itu praktek penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan prosedur yang susah. Dalam administrasi negara pelayanan salah satu tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh beberapa instansi publik untuk mewujudkan pelayanan yang baik, mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Dan juga sebagai jawaban kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap kinerja dari birokrasi pelayanan publik yang selama ini masih kurang memuaskan dari sebagian kalangan masyarakat yang mengurus perizinan seperti proses pengurusan yang terlalu berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Dan salah satu inovasi terbaru tersebut adalah program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat

dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Mewujudkan

tercapainya Reforma Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis Partisipasi Masyarakat, menerapkan Pengamanan Sosial dan Lingkungan, dan melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam mendukung Kebijakan Satu Peta.

Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan masyarakat adil, dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Demikian pula mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Misalnya, tanah Hak Milik jelas bukan tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Begitupun siapa-siapa saja yang boleh menguasai atau memilikinya serta peruntukan penggunaannya mempunyai kriteriakriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah yang sekaligus sebagai bukti penguasaan atau pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut.

Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Partisipasi Masyarakat (PM) dengan dukungan Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) diharapkan bisa memberikan nilai lebih dari aspek partisipasi, akuntabilitas dan keterlibatan warga dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis. Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) yaitu kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpul data fisik dan data yuridis. Diadakan melalui kerjasama antara ATR/BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional dimana tidak ada sebidang tanah pun yang tidak terpetakan dan terdaftar oleh PTSL. Meski belum sempurna, PTSL 2017 sampai 2019 terbukti dapat terlaksana dengan baik bahkan melebihi target. Hal ini menunjukkan sebenarnya bahwa SDM Kementerian ATR/BPN mampu dan berkompeten melaksanakan tugas besar tersebut. Namun dengan arahan dan monitoring yang tersistem dengan baik diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja maksimal sampai terpetakannya seluruh bidang tanah di Indonesia secara lengkap pada 2024.

Namun, tak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang cara pendaftaran tanah dan cara Kantor Pertanahan memproses pendaftaran tanah. Padahal masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses pendaftaran secara sistematis lengkap. Selain itu, faktor lain yang menghambat kualitas pelayanan program PTSL adalah kurangnya SDM dalam pelaksanaan program serta faktor masih

rendahnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan sosialisasi yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Kinerja atau prestasi kerja (performance) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Simamora (2000) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan menurut Simamora dapat berupa fisik maupun nonfisik yang menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil/pekerjaan baik berupa fisik/material maupun nonfisik maupun nonmaterial. Petugas Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN) Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Petugas Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN) Desa dituntut untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Keberhasilan mereka dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian tidak hanya dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya organisasi namun juga untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja puldatan. Bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan Puldatan yang kurang maksimal dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya.

Faktor yang paling menarik dikaji atau diteliti dari variabel kinerja adalah kemampuan kerja sama antara Puldatan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan Puldatan Desa. Kemampuan menunjukkan potensi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Potensi berkenaan dengan kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melakukan tugas dan bukan apa yang akan dikerjakan orang tersebut. Kemampuan memainkan peran utama dalam perilaku dan prestasi individu.

Mengingat pentingnya tuntutan produktivitas pegawai dalam suatu organisasi, motivasi kerja juga harus menjadi perhatian pengelola organisasi. Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (2000: 12), motivasi merupakan keadaan pribadi dalam seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sedangkan menurut

Wexley dan Yulk (2001: 24), motivasi diartikan sebagai suatu proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa motivasi merupakan pemberian atau penimbunan motif, sehingga pengertian motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (As'ad, 2002: 10). Hal itu dapat dilihat dengan para petugas Puldatan yang secara sadar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya paksaan atau karena adanya perintah dari pimpinan. Apabila seseorang termotivasi maka mereka akan mengadakan pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena mereka mengerti karena tindakan ini mempunyai arti bagi mereka.

Pelaksanaan pertanahan saat ini memerlukan SDM yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa puas atas jasa yang diberikan oleh Kantor Pertanahan. Oleh karena itu perlu diberikan perhatian sungguh-sungguh kepada peningkatan dan pengembangan kualitas SDM. Pada pokoknya pengembangan SDM memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan. Pembinaan SDM ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang memiliki kemampuan profesionalisme dan manajerial;
2. Meningkatkan motivasi dan dedikasi dalam pekerjaan;
3. Pembinaan ini memberikan dorongan untuk berkarya, mengabdikan, melaksanakan tugas, menyelesaikan amanat dan juga orientasi pengabdian untuk Negara, bangsa dan masyarakat;
4. Membina sikap mental, etos kerja, misalnya disiplin, kerja keras, produktif, berorientasi hasil, jujur, tertib dan lain-lain.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, pada dasarnya sangat penting artinya bagi masyarakat dalam hal pelayanan pertanahan seharusnya mempunyai pegawai-pegawai yang terampil dan profesional serta mempunyai kinerja yang baik, tetapi hal tersebut belum terlihat karena terdapat indikasi yang menunjukkan rendahnya kemampuan kerja pegawai, rendahnya motivasi pegawai dan fasilitas kerja yang kurang memadai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah tuntutan kerja penelitian agar penelitian tersebut memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian kita memerlukan data, yaitu suatu cara kerja yang menjadi pedoman penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1998:4) penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian penjajagan (*eksploratif*), penelitian penjelasan (*Eksplanatori*), dan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori, yakni suatu metode penelitian menggunakan perspektif pendekatan kualitatif dengan tipe eksplanatori yang akan digunakan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh antara kemampuan kerja, motivasi dan fasilitas kerja terhadap kinerja petugas Puldatan.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam kajian Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Desa yang menjadi lokasi PTSL, berdasarkan pertimbangan atas data yang diperlukan dan adanya gejala yang sesuai judul penelitian.

### **Jadwal Penelitian**

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021 s/d Mei 2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 macam metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk penjabarannya peneliti mengemukakan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat seperti yang diungkap oleh Alwasiah bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya.

Dengan kata lain bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian. Teknik observasi merupakan suatu studi yang sistematis dan yang dipertimbangkan dengan baik melalui “mata” kejadian-kejadian spontan pada saat terjadi. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif lengkap (*complete participation*). *Means the researcher is natural participant. This is the highest level of involvement.* Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap yang dilakukan sumber data. Dalam hal ini peneliti terlibat sebagai pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu objek pengembangan sumber daya pegawai dan pegawai lainnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jadi suasananya sudah natural, peneliti juga melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas pengembangan sumber daya anggota puldatan yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Tanah Laut. Adapun instrument observasi implementasi kebijakan pengembangan sumber daya pegawai serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu, wawancara yang tak berstruktur sering juga disebut wawancara mendalam.

Wawancara, yang akan dilakukan peneliti yakni mengadakan wawancara dengan pihak dari tempat atau lokasi sebagai lokasi penelitian yaitu di semua desa yang menjadi lokasi PTSL-PM. Sehingga peneliti tertarik untuk medalami terkait manajemen sumber daya manusia (SDM) puldatan di desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

## Wawancara dengan Kepala Desa dan Aparat Desa



## 3. Dokumentasi

Data yang mendukung untuk penelitian ini adalah :

- Semua data-data yuridis peserta PTSL-PM yaitu foto copy KTP , foto copy Kartu Keluarga, Asli Bukti Alas Hak (segel/ sporadik) dan Fotocopy, Bukti Perolehan Tanah (Kwitansi/Surat Hibah/Surat Pernyataan Ahli Waris dll), Fc. SPPT-PBB Tahun berjalan, untuk dipergunakan dalam penelitian sebagai persyaratan kelengkapan dalam mengikuti program PTSL-PM.
- Data-data yang mendukung mengenai manajemen sumber daya manusia (SDM) puldatan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

## 4.1. Jenis Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

1. Data primer, adalah data yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang sedang ditangani (Istijanto 2006). Data ini dikumpulkan secara langsung dari lapangan, yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan, distribusi questioner, survei serta wawancara.
2. Data sekunder, adalah data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pula data yang telah tersedia dalam kantor seperti data jumlah desa yang menjadi lokasi PTSL-PM dan jumlah target puldatan.

## Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep Adapun cara yang digunakan dalam teknik analisis data adalah :

1. Reduksi Data



Reduksi Data adalah data yang diperoleh di lapangan kemudian ditulis oleh peneliti dan berisi uraian atau laporan yang terperinci. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan, dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila data diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

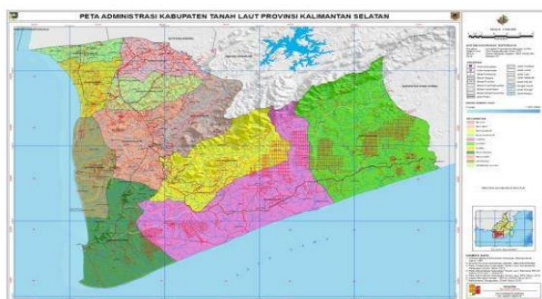
## 3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) poldatan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanah laut merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat  $3^{\circ}30'33''$  –  $4^{\circ}11'38''$  LS dan  $114^{\circ}30'20''$  –  $115^{\circ}23'31''$  BT, dengan Ibukota Kabupaten berada di Kota Pelaihari yang berjarak sekitar 60 Km dari Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.



Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Jorong dengan luasan mencapai 81.639 hektar (21,2%). Kecamatan Kintap berada pada posisi kedua dengan luas wilayah mencapai 76.319 hektar (19,8%). Pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Kecamatan Batu Ampar dan Panyipatan dengan wilayah masing-masing seluas 45.908 hektar (11,9%) dan 40.613 hektar (10,6%). Sementara itu, Kecamatan Bumi Makmur merupakan wilayah dengan luasan terkecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu seluas 9.542 (2,5%).

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan terdapat 135 desa dan kelurahan (kondisi hingga akhir tahun 2016). Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintap dengan jumlah masing-masing 14 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa.

### 2. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai Kualitas Pelayanan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian. Dalam proses penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke lokasi penelitian.

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data-data dari hasil wawancara peneliti kemudian melakukan tindakan analisis terhadap data-data yang diberikan.

Berikut ini adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber. Penyajian data yang dilakukan bersifat deskriptif atau bersifat menceritakan seperti yang terjadi ketika dilakukan wawancara kepada narasumber tersebut dan proses wawancara ini dilakukan di lima desa pada kecamatan kurau yang menjadi lokasi PTSL dengan masing-masing anggota puldatan desa.

## **2.1. Kendala dalam pelaksanaan program PTSL**

### **1. Desa Tambak Sarinah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 29 April 2021 dengan Bapak M. Kadir zailani selaku Kepala Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat kurang antusias dan kurang mengertinya masyarakat pada program tersebut sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Hamdani selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat kurang minat pada program tersebut sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan dan banyak masyarakat yang domisilinya bukan di desa Tambak Sarinah tetapi memiliki bidang tanah di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Misrawati selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat yang domisilinya bukan di desa Tambak Sarinah tetapi memiliki bidang tanah di desa tersebut, sehingga pengumpulan data-data pribadi masyarakat seperti KTP dan Kartu Keluarga terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zainal Effendi selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam

pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat pada saat pengukuran pemilik tanah tidak berada di lokasi, sehingga tim pengukuran tidak bisa mengukur batas-batas bidang tanah, serta banyak masyarakat yang enggan memberikan data-data pribadi seperti KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan pelaksanaan program PTSL bertepatan pada musim PILKADA sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

### **2. Desa Handil Negara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Sauri selaku Kepala Desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat yang merantau di luar wilayah desa Handil Negara sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasbani selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak data-data pribadi masyarakat seperti KTP dan Kartu Keluarga yang hilang dikarenakan musibah banjir yang dialami masyarakat di desa Handil Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hairil Anwar selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah disamping data-data pribadi masyarakat seperti KTP dan Kartu Keluarga banyak yang hilang dikarenakan musibah banjir, masyarakat juga kurang antusias dengan program PTSL tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Maswan selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah sebagian dari masyarakat tidak tahu tentang batas-batas tanah yang dimiliki sehingga masyarakat tidak mau ikut program PTSL ini.



### **3. Desa Kali Besar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saprudin selaku Kepala Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat yang diluar desa Kali Besar memiliki tanah di desa Kali Besar dan banyak masyarakat yang kurang antusias mengikuti program PTSL sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Haderi selaku anggota puldatan desa Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat yang diluar desa Kali Besar memiliki tanah di desa Kali Besar dan banyak masyarakat yang kurang antusias mengikuti program PTSL serta pada saat pengukuran sebagian masyarakat kurang mengetahui batas-batas bidang tanahnya sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdusalam selaku anggota puldatan desa Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat yang diluar desa Kali Besar memiliki tanah di desa Kali Besar dan banyak masyarakat yang kurang antusias mengikuti program PTSL serta pada saat pengukuran sebagian masyarakat kurang mengetahui batas-batas bidang tanahnya sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

### **4. Desa Padang Luas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suardana Pelangi selaku Kepala desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah kurang minat masyarakat pada program tersebut sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan dan banyak masyarakat yang domisilinya

bukan di desa Padang Luas tetapi memiliki bidang tanah di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aditya selaku anggota puldatan desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak masyarakat pada saat pengukuran pemilik tanah tidak berada di lokasi, sehingga tim pengukuran tidak bisa mengukur batas-batas bidang tanah, serta banyak masyarakat yang enggan memberikan data-data pribadi seperti KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan pelaksanaan program PTSL bertepatan pada musim PILKADA sehingga anggota Puldatan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan.

### **5. Desa Kurau**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anang Kaderi selaku Kepala desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak data-data pribadi masyarakat seperti KTP dan Kartu Keluarga yang hilang dikarenakan musibah banjir yang dialami masyarakat di desa Kurau dan banyak masyarakat yang diluar desa Kurau memiliki tanah di desa Kurau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Hadi selaku anggota puldatan desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, kendala pelaksanaan program PTSL dalam pengumpulan data-data pertanahan. Menurut beliau, kendalanya adalah banyak data-data pribadi masyarakat seperti KTP dan Kartu Keluarga yang hilang dikarenakan musibah banjir yang dialami masyarakat di desa Kurau dan banyak masyarakat yang diluar desa Kurau memiliki tanah di desa Kurau.

## **2.2. Kemampuan Anggota Puldatan dalam menyelesaikan pekerjaannya**

### **1. Desa Tambak Sarinah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Kadir zailani selaku Kepala Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan tugas masing-

masing anggota bahkan menurut beliau anggota Puldatan berkerja hingga larut malam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Hamdani selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Misrawati selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zainal Effendi selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

## **2. Desa Handil Negara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Sauri selaku Kepala Desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah cukup mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasbani selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam

pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah cukup mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hairil Anwar selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah cukup mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Maswan selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah cukup mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan menurut beliau sebelum melaksanakan pekerjaan ini sudah diberikan bekal pelatihan.

## **3. Desa Kali Besar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saprudin selaku Kepala Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL pada awal bekerja belum cukup mengerti tetapi dengan bejalannya waktu dan dibantu oleh pihak ke-3 pengukuran anggota sudah mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan dengan bekal pelatihan yang cukup membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Haderi selaku anggota puldatan desa Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL pada awal bekerja belum cukup mengerti

tetapi dengan bejalannya waktu dan dibantu oleh pihak ke-3 pengukuran anggota sudah mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan dengan bekal pelatihan yang cukup membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **4. Desa Padang Luas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suardana Pelangi selaku Kepala desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL pada awal bekerja belum cukup mengerti tetapi dengan bejalannya waktu dan dibantu oleh pihak ke-3 pengukuran anggota sudah mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan dengan bekal pelatihan yang cukup membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aditya selaku anggota puldatan desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL pada awal bekerja belum cukup mengerti tetapi dengan bejalannya waktu dan dibantu oleh pihak ke-3 pengukuran anggota sudah mengerti dengan tugas masing-masing anggota dan dengan bekal pelatihan yang cukup membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **5. Desa Kurau**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anang Kaderi selaku Kepala desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL anggota sudah mengerti dengan tugas masing-masing anggota dikarenakan di desa Kurau sudah pernah melaksanakan program PTSL pada tahun sebelumnya dan dengan bekal pelatihan yang cukup membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Hadi selaku anggota puldatan desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang

kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai atau belum menurut beliau, untuk kemampuan anggota Puldatan dalam pelaksanaan program PTSL anggota sudah mengerti dengan tugas masing-masing anggota dikarenakan di desa Kurau sudah pernah melaksanakan program PTSL pada tahun sebelumnya dan dengan bekal pelatihan yang cukup membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

### **2.3. Target Waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pekerjaan**

#### **1. Desa Tambak Sarinah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Kadir zailani selaku Kepala Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Hamdani selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Misrawati selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zainal Effendi selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

## **2. Desa Handil Negara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Sauri selaku Kepala Desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasbani selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hairil Anwar selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Maswan selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

## **3. Desa Kali Besar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saprudin selaku Kepala Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu

singkat serta mendekati akhir tahun dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan banyak masyarakat yang kelengkapan persyaratannya hanyut karena musibah banjir sehingga anggota Puldatan kesulitan dan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Haderi selaku anggota puldatan desa Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat serta mendekati akhir tahun dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan banyak masyarakat yang kelengkapan persyaratannya hanyut karena musibah banjir sehingga anggota Puldatan kesulitan dan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

## **4. Desa Padang Luas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suardana Pelangi selaku Kepala desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aditya selaku anggota puldatan desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

## **5. Desa Kurau**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anang Kaderi selaku Kepala desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat serta mendekati akhir tahun dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi

persyaratan yang diperlukan dan banyak masyarakat yang kelengkapan persyaratannya hanyut karena musibah banjir sehingga anggota Puldatan kesulitan dan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Hadi selaku anggota puldatan desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan, tentang target waktu, apakah target waktu yang diberikan sudah sesuai atau tidak sesuai target waktu yang diberikan, menurut beliau target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

#### **2.4. Koordinasi antara anggota puldatan**

##### **1. Desa Tambak Sarinah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Kadir zailani selaku Kepala Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan lancar di desa Tambak Sarinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Hamdani selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan lancar di desa Tambak Sarinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Misrawati selaku anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan lancar di desa Tambak Sarinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zainal Effendi selaku

anggota puldatan desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan lancar di desa Tambak Sarinah.

##### **2. Desa Handil Negara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Sauri selaku Kepala Desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Handil Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasbani selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Handil Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hairil Anwar selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldatan apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Handil Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Maswan selaku anggota puldatan desa Handil Negara Kecamatan Kurau Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota

Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Handil Negara.

### **3. Desa Kali Besar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saprudin selaku Kepala Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Kali Besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Haderi selaku anggota puldata desa Kali Besar Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Kali Besar.

### **4. Desa Padang Luas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suardana Pelangi selaku Kepala desa Padang Luas Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik walaupun pada saat pelaksanaannya ada anggota yang belum mengerti apa yang akan dilakukan tetapi dengan dibantu oleh adanya tim pihak ketiga, anggota cukup mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL semakin hari semakin berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Padang Luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aditya selaku anggota puldata desa Padang Luas Kecamatan Kurau.

Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik walaupun pada saat pelaksanaannya ada anggota yang belum mengerti apa yang akan dilakukan tetapi dengan dibantu oleh adanya tim pihak ketiga, anggota cukup mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL semakin hari semakin berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Padang Luas.

### **5. Desa Kurau**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anang Kaderi selaku Kepala desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya karena di desa Kurau pernah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Kurau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supian Hadi selaku anggota puldata desa Kurau Kecamatan Kurau. Dengan pertanyaan berikutnya tentang koordinasi dengan masing-masing anggota Puldata apakah berjalan dengan baik atau tidak, menurut beliau untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan menurut beliau masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya karena di desa Kurau pernah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan di desa Kurau.

### **3. Pembahasan**

Objek penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Desa-desa yang menjadi Lokasi PTSL. Analisa data yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk wawancara dan kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dalam bentuk

penjelasan berdasarkan data yang ada di lapangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dibuat analisa dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Kendala dalam pelaksanaan program PTSL**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa-desa yang menjadi lokasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PTSL adalah kurang antusiasnya masyarakat dan banyak masyarakat kurang memahami program PTSL. Pada saat pengukuran masyarakat juga kurang tahu dengan batas-batas bidang tanah yang dimiliki sehingga menghambat pelaksanaan pengukuran dan banyak bidang-bidang tanah di desa tersebut pemilikinya bukan berasal dari wilayah desa tersebut.

Menurut Charles O. Jones (1996:24), cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai.

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil analisis penulis tentang kendala dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Laut banyak kendala yang dihadapi dan perlu dibenahi. Hal ini terlihat dari data yang diterima dilapangan, target PTSL pada tahun 2018 yaitu 10.100 bidang tanah dan data yang diperoleh berjumlah 9048. Kemudian target PTSL tahun 2019 yaitu 20.500 bidang tanah dan data yang diperoleh berjumlah 7299. Dan pada tahun 2020 target PTSL yaitu 20.000 bidang tanah dan data yang diperoleh berjumlah 13.059. Untuk tahun 2021 proses pelaksanaan PTSL masih dalam tahap pengerjaan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahawa masih banyak masyarakat yang belum mengikuti program PTSL ini. Adapun kendala lain masih kurangnya kesadaran masyarakat menjaga aset dan batas-batas tanahnya serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah.

### **2. Kemampuan Anggota Puldatan (SDM) dalam menyelesaikan pekerjaannya**

Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:23), Kompetensi petugas pemberi

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, kemampuan semua anggota puldatan (SDM) sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menggunakan juknis dan juklak sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terorganisir. untuk kemampuan anggota Puldatan (SDM) dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan tugas masing-masing anggota bahkan menurut beliau anggota Puldatan berkerja hingga larut malam.

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil analisis penulis kemampuan SDM sudah sesuai dengan keahliannya dibidang masing-masing karena semua anggota diberikan pelatihan khusus dan adanya evaluasi setiap minggu yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja kurangnya antuias dan mengertinya masyarakat tentang program PTSL memengaruhi kinerja anggota puldatan sehingga kurang maksimal. Hal ini didukung dengan data masyarakat yang mengikuti program PTSL belum siap terinput, sehingga membuat data yang ada dilapangan dan data di Kantor menjadi tidak seimbang.

### **3. Target Waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pekerjaan**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa-desa yang menjadi lokasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, bahwa waktu yang diberikan dalam pelaksanaan program PTSL target waktu yang diberikan terlalu singkat dan mendadak pelaksanaannya, sehingga banyak masyarakat tidak cukup siap untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan anggota Puldatan tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Menurut L.A. Appley (dalam Heidjrachman, 1990), manajemen merupakan keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan. Hal senada juga dikemukakan oleh Siagian (2004) bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain.

Menurut Sanusi (dalam Isworohadi, 2009), manajemen waktu adalah kemampuan



dalam menentukan dan melaksanakan seluruh pekerjaan dengan tujuan dan batasan waktu yang jelas, baik dalam kehidupan professional maupun pribadi. Hal senada juga disampaikan oleh Jones & Barlett (2004) menjelaskan, manajemen waktu sebagai kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan, melaksanakan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut.

Berdasarkan hasil analisis penulis, tentang target waktu dalam pelaksanaan program PTSL kepada anggota puldatan tidak sesuai sesuai diharapkan agar waktu pelaksanaan program PTSL tersebut dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehingga semua pelaksanaan bisa tercapai dengan target yang sudah di tentukan.

#### **4. Koordinasi antara anggota puldatan**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa-desa yang menjadi lokasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, tentang koordinasi antara anggota puldatan. Untuk koordinasi masing-masing anggota berjalan dengan baik bahkan masing-masing anggota sudah mengerti dengan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan bekal pelatihan yang diberikan.

Menurut Syamsi (2012 : 113), menegaskan, jika koordinasi berjalan baik, maka tidak akan terjadi kesemrautan, kekacauan, tumpang tindih dan kekosongan kerja. Simatupang, J. H., Pabalik, D., & Nurchasanah, S. (2019) juga menyatakan bahwa faktor koordinasi menjadi penentu dalam pencapaian yang maksimal dari target suatu organisasi yang ingin dicapai.

Koordinasi diperlukan karena dalam, suatu organisasi terdapat adanya perbedaan dalam satuan, pekerjaan, orang atau pejabat. Perbedaan itu ada karena adanya pembagian tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang mengarah kepada spesialisasi, sebagai konsekuensi berorganisasi atau bekerja sama. "tanpa koordinasi karyawan dan departemen-departemen dalam organisasi akan kehilangan arah mengenai peran mereka dalam organisasi. Kebutuhan akan koordinasi berbeda untuk suatu organisasi dengan yang lain. Kebutuhan ini akan tergantung pada sifat tugas yang dijalankan dan kebutuhan komunikasi serta ketergantungan dari berbagai satuan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Semakin bergantung pekerjaan mereka dengan kegiatan bagian lain semakin perlu koordinasi kalau

tidak, pelaksanaan koordinasi pekerjaan akan makin tidak efisien”.

Berdasarkan hasil analisis penulis, koordinasi antara anggota puldatan (SDM) sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menggunakan juknis dan juklak sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terorganisir dan pelatihan yang sudah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, kendala dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Laut banyak kendala yang dihadapi dan perlu dibenahi. Hal ini terlihat dari data yang diterima dilapangan, target PTSL pada tahun 2018 yaitu 10.100 bidang tanah dan data yang diperoleh berjumlah 9048. Kemudian target PTSL tahun 2019 yaitu 20.500 bidang tanah dan data yang diperoleh berjumlah 7299. Dan pada tahun 2020 target PTSL yaitu 20.000 bidang tanah dan data yang diperoleh berjumlah 13.059. Untuk tahun 2021 proses pelaksanaan PTSL masih dalam tahap pengerjaan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengikuti program PTSL ini. Adapun kendala lain masih kurangnya kesadaran masyarakat menjaga aset dan batas-batas tanahnya serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah.

Kedua, kemampuan semua anggota puldatan (SDM) sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menggunakan juknis dan juklak sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terorganisir.

Ketiga, target waktu dalam pelaksanaan program PTSL kepada anggota puldatan tidak sesuai sesuai diharapkan agar waktu pelaksanaan program PTSL tersebut dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehingga semua pelaksanaan bisa tercapai dengan target yang sudah di tentukan.

Keempat, koordinasi antara anggota puldatan (SDM) sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut menggunakan juknis dan juklak sebagai acuan dasar dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terorganisir dan pelatihan yang sudah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

## SARAN

Agar tujuan dari pelaksanaan program PTSL tercapai maka instansi harus bekerja lebih baik lagi dari hari kemarin agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meningkat. Petugas pelaksana program PTSL harus bisa bekerja secara efektif disetiap harinya agar segala laporan kinerja baik dikantor ataupun dilapangan dapat segera terselesaikan.

Dengan adanya program jemput bola ini diharapkan pelaksanaan program PTSL ini tepat sasaran. Petugas pelaksana PTSL dilapangan harus meningkatkan sosialisasi tidak hanya kedesa yang mudah dijangkau saja tetapi desa yang sulit dijangkau juga harus dijadikan sasaran agar banyak masyarakat desa yang sadar akan pentingnya proses pendaftaran tanah sehingga mempermudah pelaksanaan antara petugas dan warga desa. Sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien.

## Referensi

- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*. Jakarta: Djambatan.
- Widjaja, Amin. 2001, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Titien Indarwati Subroto, 2008. *Analisis Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Tongam Nadeak, 2018. *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*.
- Suwono Budi Hartono, Mei Indrawati, Hidayat, 2019. *Jurnal Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Ditinjau*

*dari Kompetensi, Ketrampilan dan Kepemimpinan*. Tuban, Jawa Timur.

- Winda Sandra Dewi Mambrasar, Senthot Sudirmn, Wahyuni, 2020. *Jurnal Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM), Kendala dan Solusinya*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Buku Panduan Pudatan, 2020. *Program Percepatan Reforma Agraria*. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2021. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.